

MENETAS JALAN BARU
STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM:
Sebuah Jawaban di Era Globalisasi

Suraji¹

Abstract

The concept of community development can be viewed as a process because the involved activities moves from one stage to another or from a specific situation to the next one. The relevant study in it is the study of Islamic Community Development which is in line with the role of Higher Education College. That is to functioning Tri Darma consisting of education, research and community services. Such view certainly becomes real hope if it can implemented seriously. Another factor is that the specialization of knowledge as the basis of intellectual and expertise specially the study of community development have an important and strategic place in the globalization era in terms of political, economic, social and cultural rights.

Keywords: community, development, local wisdom, globalization.

A. Pendahuluan

Era globalisasi dan era kebebasan beragama telah menjaral di masyarakat. Isu agama, politik, kekerasan, radikalisasi, terorisme dan lebih-lebih pelecehan agama sudah menjadi informasi yang sering muncul di media, sehingga pemerintah, institusi agama (ormas), masyarakat seakan-akan dibuat bingung. Hal ini dikarenakan sedikit banyak akan memperkeruh dan merusak sendi-sendi agama dan bangsa. Dalam fakta yang lain, ustad/kyai, tokoh masyarakat, elit politik yang menjadi panutan sudah melakukan perselingkuhan politik, bahkan secara langsung terjun di politik praktis. Umat kehilangan arah karena tokoh panutan telah berpindah orientasi dari jangka pendek

¹ Dosen dan Ketua P3M (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat) STAIMAFA, sedang menyelesaikan program doktoral di UGM, Yogyakarta.

yang mendapat porsi material, ketimbang orientasi jangka panjang yang membawa kebahagiaan dan kearifan. Ormas agama sudah tidak lagi menjadi bagian dari civil society tetapi cenderung menjadi kekuatan elit, bahkan corong penguasa yang kurang peduli terhadap kemiskinan, kebodohan dan pengangguran. Di sisi lain, inisiatif pengembangan masyarakat berasal, bersumber, dan disusun serta direncanakan dari luar masyarakat atau dari pemerintah pusat. Dalam menyusun dan merencanakan kurang memperhatikan prakarsa, potensi kebutuhan dan inisiatif lokal. Tidak mengherankan bila inisiatif masyarakat sulit untuk berkembang, sehingga dalam berbagai hal masyarakat lokal amat tergantung pada kekuatan dan kekuasaan luar dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program pengembangan masyarakat partisipasi komunitas lokal rendah karena mereka tidak tahu apa tujuan dari suatu program. Dalam kondisi demikian kelanjutan setiap program sangat rapuh karena sikap memiliki dan rasa tanggung jawab untuk meneruskan apa yang telah dilakukan tidak muncul. Sikap ini sangat kurang menguntungkan dalam mencapai pengembangan masyarakat yang diharapkan.

Mempertimbangkan kelemahan itu muncul pendekatan baru dalam pengembangan masyarakat yang menekankan pada upaya memperkuat kemampuan masyarakat lokal dengan menumbuhkan partisipasi, inisiatif dan kepemimpinan masyarakat lokal. Untuk mencapai itu memberdayakan masyarakat dan memperkuat institusi lokal sangat diperlukan, sehingga pemberdayaan tidak hanya menyangkut aspek politik, sosial, ekonomi, tetapi yang lebih penting juga pemberdayaan nilai-nilai agama dan masyarakat lokal (kearifan lokal/lokal genius). Prinsip pemberdayaan adalah memberi kewenangan dan otoritas pada masyarakat lokal untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan dan secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam kancah permasalahan tersebut dibutuhkan ijtihad dan gerakan baru untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek sekaligus

obyek pemberdayaan yang dikomandoi oleh pionir-pionir baru yang memahami ilmu, teori, dalil-dalil, serta didukung oleh wahana budaya pesantren yang berpengalaman dan matang dalam keorganisasian serta secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara masif. Dalam konteks tersebut orientasi studi pengembangan masyarakat perlu mendapat perhatian dan dipelajari sebagai bagian ilmu penting di era saat ini dan masa-masa mendatang. Berdasarkan persoalan ini, tulisan ini mencoba menganalisis studi pengembangan masyarakat sebagai jawaban di era globalisasi.

B. *Community Development*: Sejarah, Konsep dan Realita

Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah melalui definisinya. Sehubungan dengan hal tersebut, *community development* ternyata mempunyai banyak definisi, bahkan dapat dikatakan sangat bervariasi. Sebagai ilustrasi sebagaimana yang dikemukakan dalam tulisan Hayden (1979) yang menyajikan sejumlah definisi berbeda yang berlaku dalam berbagai negara. Hayden menyajikan definisi *community development* yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Rhodesia dan juga definisi yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dapat terjadi dalam suatu negara *community development* ditampilkan lebih dari satu definisi. Sebagai contoh dapat dikutipkan definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. *Community Development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.² Definisi tersebut, juga definisi lain yang senada, pada umumnya mendapat kritik paling tidak dalam hal adanya unsur “patronase” yang

² Robert Hayden, *Community Development Learning and Action*, (Toronto Landon: University of Toronto Pres, 1979), hlm. 175.

terkandung di dalamnya. Penilaian semacam itu muncul karena dalam definisi tersebut terkesan adanya orientasi yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan kepentingan komunitas. Di samping itu juga dirasakan hubungan antara komunitas dengan otoritas pemerintah (dan juga badan-badan pembangunan non-pemerintah) bersifat vertikal. Seolah-olah otoritas di luar komunitas yang lebih memiliki sumber daya, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan skill, sehingga berposisi sebagai pihak pemberi sedangkan komunitas sebagai pihak penerima.

Kesan akan adanya hubungan vertikal antara badan-badan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah dengan komunitas yang akan dibangun juga semakin menguat dari adanya anggapan bahwa strategi *community development* diperuntukkan bagi usaha membantu pengembangan masyarakat yang masih terbelakang bahkan primitif. Melalui pemikiran seperti itu, kemudian dianggap ada jarak dalam tingkat peradaban antara komunitas yang hendak dibantu dengan badan-badan pembangunan dari luar komunitas. Dalam hal ini, pihak dari luar komunitas yang lebih maju peradabannya akan membantu masyarakat terbelakang untuk mempercepat proses perubahan dan pembaruan guna mengejar ketinggalan.

Dalam tinjauan ilmuwan politik, pengertian *community development* seperti itu juga mudah menimbulkan kekhawatiran bahwa strategi *community development* dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat penetrasi negara (melalui berbagai lembaga dan instansi yang mempunyai program pembangunan sampai pada level komunitas) terhadap masyarakat. Dalam konteks hubungan antara negara dengan masyarakat, *community development* mengandung dua proses yang berjalan serentak namun kontradiktif yaitu proses memasukkan desa ke dalam negara dan proses memasukkan negara

ke dalam desa.³ Penetrasi negara ke desa (komunitas) akan semakin menguat apabila proses kedua yang lebih dominan. Kekhawatiran dari tinjauan ilmu politik tersebut akan lebih memperoleh dasarnya apabila digunakan untuk memahami pelaksanaan *community development* yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial di daerah jajahannya.

Sebagai bahan perbandingan dapat ditampilkan definisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson (1989). Dengan terlebih dahulu memaparkan sejumlah definisi yang sudah ada, mereka kemudian mendefinisikan *community development* sebagai suatu proses di mana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka.⁴ Dari rumusan tersebut terlihat kesan bahwa definisi Christenson dan Robinson hendak menyatakan bahwa dalam *community development* intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung. Walaupun terkesan adanya beberapa variasi dalam definisi yang ada dengan masing-masing memberikan penekanan pada aspek yang berbeda, tetapi dapat ditarik beberapa prinsip umum yang selalu muncul. Prinsip-prinsip tersebut adalah pertama, fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan. Kedua, berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas. Ketiga, mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Dipandang dari terminologi yang digunakan, konsep *community development* juga sering dikatakan mengandung potensi kontradiksi. Hal ini disebabkan karena dalam konsep *community* terkandung tiga elemen penting yaitu lokalitas (*local ecology*), kehidupan sosial yang

³ Sumarjono, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 1994), hlm. 24.

⁴ Christenson, James, dan Robinson, Jery, *Community Development in Perpsective*, (Ames: Iowa State University Pres, 1989), hlm. 14.

terorganisasi dan solidaritas sosial. Di lain pihak, dalam konsep development terkandung unsur perubahan kondisi sosial ekonomi. Unsur-unsur yang terkandung dalam kedua konsep tersebut dapat berjalan seiring dan saling mendukung, tetapi dapat juga sebaliknya. Sebagai contoh hubungan yang tidak saling mendukung adalah, perubahan kehidupan ekonomi dalam suatu masyarakat dapat mengakibatkan melemahnya solidaritas sosial. Menanggapi permasalahan tersebut para pengembangnya mengatakan bahwa strategi community development justru ingin mengintegrasikan dan mensinergikan unsur-unsur dari dua konsep tersebut, yang sekaligus merupakan ciri khasnya. Dengan kata lain dapat dijelaskan, bahwa dalam community development terkandung pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan manusia dan relasi sosialnya dalam posisi saling mendukung. Pembangunan ekonomi tanpa pembangunan aspek manusianya tidak dapat disebut sebagai community development.⁵ Penjelasan yang senada juga dapat dijumpai dalam uraian Sanders (1958) dalam rangka menjelaskan hubungan sekaligus perbedaan antara community development dan community organization, ia mengurai konsep community development dengan menggunakan analogi nama orang Barat yang pada umumnya mengandung first name dan surname. Dalam hal ini community sebagai first name dan development sebagai surname. Community sebagai first name sebetulnya yang dimaksud adalah community organization yang di dalamnya memberikan penekanan pada partisipasi masyarakat dan perencanaan sosial, sedangkan development sebagai surname yang dimaksudkan adalah economic development yang mengandung unsur peningkatan produktivitas dan efisiensi, distribusi sumber daya dan perbaikan kondisi ekonomi. Dengan demikian, community development adalah community organization yang mengandung unsur pembangunan ekonomi atau community development adalah pembangunan ekonomi yang juga mempunyai watak sosial atau watak sebagai pembangunan manusia.

⁵ Ibid, hlm. 4.

Dengan melalui *community development* sebagai proses untuk meningkatkan kondisi kehidupan yang memberikan fokus perhatian pada komunitas sebagai suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat, guna merealisasikan tujuan tersebut cenderung lebih mengandalkan pada pemanfaatan dan pendayagunaan energi yang ada dalam kehidupan komunitas itu sendiri.

Dalam penggunaannya di Indonesia, konsep *community development* juga diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang berbeda. Beberapa pihak menerjemahkan *community development* sebagai pembangunan masyarakat. Dilihat dari terjemahan unsur kata-katanya barangkali tidak salah, walaupun demikian dalam penggunaannya sebagai konsep yang bulat mungkin dapat mendatangkan dualisme pengertian. Sebagaimana diketahui, pengertian pembangunan masyarakat dapat dipandang dari sudut arti luas dan dapat pula dari sudut arti sempit. Dalam arti luas, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana baik dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial maupun politik. Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat berarti proses pembangunan yang lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya. Dalam arti sempit, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana pada suatu lokalitas tertentu.⁶ Dilihat dari pelaksanaannya sampai saat ini, *community development* lebih condong merupakan pengertian yang kedua. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa *community development* merupakan salah satu pelaksanaan atau strategi dari pembangunan masyarakat dalam pengertian luas. Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan dengan pengertian pembangunan masyarakat dalam arti luas, *community development* oleh sementara pihak tidak diterjemahkan sebagai pembangunan masyarakat, tetapi dengan istilah pembangunan komunitas atau pengembangan komunitas.

⁶ Ndraha, Talizuduhu, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 72.

Dengan begitu konsep *community development* dapat dilihat sebagai suatu proses, karena aktivitas *community development* tersebut bergerak dari suatu tahap atau kondisi tertentu ke tahap atau kondisi berikutnya. *Community development* proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. *Community development* juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu *community development* didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi.

C. Community Development : Sebagai Kebutuhan

Perkembangan *community development* dapat dilihat dalam kedudukannya sebagai suatu disiplin atau mata kajian ilmu pengetahuan dan dapat pula dilihat dalam kedudukannya sebagai sebuah strategi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Sebagai sebuah disiplin, perkembangan *community development* di Amerika Serikat dimulai dari karya Biddle di Earlham College Richmond Indiana pada tahun 1947.⁷ Dalam perkembangannya kemudian, lebih dari 80 universitas dan college menawarkan courses tentang *community development*, dan beberapa di antaranya mempunyai program master di bidang ini. Sebagai media pengembangan disiplin sekaligus sarana tukar-menukar informasi di antara peminat kajian ini, di Amerika Serikat sempat berdiri suatu himpunan peminat *community development*. Di samping itu,

⁷ James Christenson dan Jery Robinson, *Community Development in Perpspective*, (Ames: Iowa State University Pres 1989), hlm. 18.

ternyata *community development* juga banyak dikembangkan di berbagai negara di luar Amerika, terbukti adanya beberapa universitas yang menerbitkan jurnal tentang *community development* ini, di antaranya penerbitan Oxford University Press.

Selain Biddle, penulis lain yang cukup berpengaruh pada awal perkembangan disiplin ini adalah TR Batten. Banyak tulisannya yang diterbitkan pada periode 1950-an dan 1960-an. Pada umumnya, perhatian Batten lebih banyak dicurahkan pada teknik *community development*, terutama tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itulah pemikiran-pemikirannya banyak digunakan dalam berbagai pelatihan bagi para petugas lapangan. Salah satu di antara buku-buku karangan Batten tersebut yang berjudul *Community and Their Development* sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Surjadi dengan judul *Pembangunan Masyarakat Desa*.

Community Development sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan juga dikemukakan dalam laporan Richard W. Poston (1987), berjudul *Report of the Chairman, Division of Community Development*.⁸ Laporan tersebut mendefinisikan *community development* sebagai suatu sistem pengetahuan (*body of knowledge*) yang mempelajari komunitas sebagai suatu kebulatan dan berbagai aspek serta hingsi kehidupannya yang merupakan bagian dari kebulatan tersebut. Sebagai suatu sistem pengetahuan, dari disiplin *community development* ini memang diharapkan lahir berbagai teori atau setidaknya proposisi yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dasarnya. Teori dan proposisi tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami bahkan melakukan prediksi tentang berbagai fenomena sosial dan kecenderungan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Di samping itu, teori dan proposisi tersebut juga dapat digunakan sebagai pedoman operasional

⁸Talizuduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), hlm. 79.

pelaksanaan *community development* di lapangan. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, teori dan proposisi dalam bidang *community development* akan sangat bermanfaat sebagai landasan pencarian informasi serta petunjuk dalam mencari keterkaitan antarfenomena dalam rangka pengembangan kajian *community development* itu sendiri.

Dalam realitanya, pengembangan teori dalam *community development* paling tidak menghadapi dua masalah pokok. Pertama, tidak dapat disangkal bahwa teori dan proposisi dalam *community development* sering kali harus diturunkan atau merupakan derivasi dari teori yang lebih bersifat makro. Dengan demikian dibutuhkan kejelasan hubungan antara konsep-konsep *community development* dengan konsep-konsep dalam teori yang lebih makro tersebut, seperti perubahan sosial dan konsep pembangunan pada umumnya. Kedua, teori dan proposisi memang dapat dibangun dari abstraksi dan generalisasi kasus-kasus empirik. Dalam kenyataannya, hal ini pun bukan cara yang mudah dan sederhana, karena berbagai pengalaman pelaksanaan *community development* tersebut pada umumnya berasal dari sejumlah komunitas kecil yang sangat bervariasi.

Sebagai suatu strategi pembangunan masyarakat, di negara-negara sedang berkembang *community development* sudah mulai dilaksanakan sejak negara-negara tersebut masih berada dalam masa penjajahan. Sudah barang tentu hal ini juga lebih banyak merupakan perluasan dari pe-nerapan *community development* yang sudah dilakukan dalam masyarakat negara penjajahnya. Sebuah sumber mengatakan, bahwa istilah *community development* sudah digunakan oleh kantor yang mengurus daerah koloni Inggris sejak tahun 1948. Konferensi tentang pemerintahan Afrika memberi batasan untuk istilah tersebut sebagai suatu gerakan yang dirancang guna memajukan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh komunitas dengan partisipasi aktif yang jika mungkin atas prakarsa masyarakat, tetapi jika prakarsa itu tidak datang secara spontan,

digunakan teknik untuk merangsang dan membangkitkannya dengan maksud mendorong tanggapan aktif dan antusias terhadap gerakan itu.⁹

Lebih lanjut, selama tahun-tahun 1950-an, *community development* dilaksanakan secara meluas baik oleh pemerintah jajahan Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun pemerintah di sejumlah negara sedang berkembang. Pokok-pokok pikiran tentang *community development* tersebut kemudian secara garis besar termuat dalam dokumen PBB yang dirumuskan tahun 1955. Konsep tersebut kemudian semakin memasyarakat secara internasional yang pada umumnya mengandung beberapa prinsip yaitu: Pertama, mempersatukan usaha dari rakyat untuk rakyat dengan usaha pemerintah. Kedua, memajukan usaha ekonomi, sosial dan kebudayaan. Ketiga, mengintegrasikan komunitas dengan masyarakat nasional. Dilihat sebagai suatu proses perubahan dan pembaruan, dua unsur yang dianggap paling hakiki dan diharapkan saling mendukung dalam *community development* adalah partisipasi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin berdasarkan prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atau bentuk pelayanan lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi.

Melihat prinsip-prinsip yang terkandung dalam *community development* tersebut, tidak mengherankan apabila di saat-saat awal kemerdekaannya banyak negara-negara sedang berkembang yang tertarik untuk menggunakan strategi ini dalam pelaksanaan pembangunannya. Salah satu faktor yang mendukung ketertarikan tersebut adalah adanya prinsip swadaya atau *self help* yang terkandung dalam strategi *community development*. Prinsip tersebut sejalan dengan kecenderungan dan iklim yang sedang melanda negara-negara yang baru saja lepas dari cengkeraman penjajah. Dalam kondisi yang demikian, adalah wajar apabila semangat kemandirian dan kebebasan sedang singgah di hati masyarakat dan

⁹ Stewart Mac Pherson, *Kebijaksanaan Sosial di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 226.

para pemimpin bangsa, sebagai ungkapan pembuktian bahwa sebagai bangsa mampu untuk mengelola negara sendiri. Guna melaksanakan strategi ini ada sejumlah negara sedang berkembang yang menerapkannya secara selekrif di beberapa komunitas terpilih, biasanya dalam bentuk pilot proyek, tetapi ada pula sejumlah negara lain yang menerapkannya secara nasional. Di samping itu dilihat dari pihak yang menyelenggarakan, *community development* dapat dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

D. Tinjauan Islam dan Pesantren dalam Studi *Community Development*

Dalam mengkaji Studi Pengembangan Masyarakat Islam tidak dapat terlepas dari sejarah Islam itu sendiri yakni Nabi Muhammad SAW sebagai awal pembawa Agama Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di berjuang di Kota Makkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Tuhan memberinya petunjuk untuk hijrah ke Yatsrib, kota Wahah atau oas sebelah utara Makkah. Sesampai di Yatsrib, setelah perjalanan yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, beliau disambut para sahabat dengan menyanyikan syair *Tāla' al badr 'alain* "Bulan purnama telah menyinging di atas kita", untaian syair dan lagu yang kelak terkenal di seluruh dunia. Kemudian, setelah mapan dalam kota hijrah nama Yatsrib menjadi *al-Madinah*, artinya 'kota', yang dilengkapkan menjadi *Madinah an-Nabi* (kota nabi).¹⁰

Secara konvensional perkataan '*madinah*' memang di artikan sebagai kota. Akan tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab yang artinya

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Beragama di Abad Dua Satu: Sebuah Kumpulan Esai Peradaban*, (Bandung: Penerbit Zikrul Hakim, 1997), hlm. 14.

'peradaban' memang dinyatakan dalam kata-kata '*madaniyyah*' atau '*tamaddun*', selain dalam kata-kata '*ḥadīrah*'. Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukung atas kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan masyarakat beradab. Tidak lama setelah menetap di Madinah, kemudian Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersama Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu sebagai Piagam Madinah (*Milsaq al-Madinah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain kepada wawasan terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab khususnya pertahanan, secara bersama. Dan di Madinah itu pula, sebagai pembelaan kepada masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan perang membela diri menghadapi musuh-musuh peradaban.

Rasulullah selama sepuluh tahun membangun masyarakat yang berperadaban di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat *rabbaniyah* atau *ribbiyyah*. Inilah *ḥablum min Allah* "tali hubungan dengan Allah", dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Semangat *rabbaniyah* atau *ribbiyyah* itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat *insaniya* atau *basyariyah*, dimensi horizontal hidup manusia, *ḥabluminannas*. Kemudian semangat perikemanusiaan itu sendiri memancar dalam berba pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur.

Dalam konteks yang lain, peradaban sebagai pengembangan masyarakat yang di lakukan Rasulullah adalah membangun masyarakat madani, 'civil society'. Masyarakat madani menurut Robert N. Bellah (1967) seorang ahli sosiologi agama terkemuka,

disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga Nabi sendiri wafat, tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi. Menurut Nurcholish Madjid (1997) masyarakat madani warisan Nabi saw. yang bercirikan antara lain egalitarisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan berdasarkan keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.

Sedangkan dalam konteks pesantren kajian Studi Pengembangan Masyarakat Islam tidak dapat dilepaskan dari kyai dan pesantren itu sendiri yang lahir jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam setting sejarah perjuangan merebut kemerdekaan dan menghadapi ancaman pergolakan di dalam negeri seperti pemberontakan PKI, kyai selalu menempatkan negara pada posisi penting yang wajib dibela dan dipertahankan. Kehadiran kyai dalam setiap perubahan di Indonesia, menurut Dhofier menunjukkan bahwa kyai yang terikat dengan pola pemikiran Islam tradisional mampu membenahi diri untuk tetap memiliki peranan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Kyai juga berhasil memperbaharui penafsiran tentang Islam tradisional sesuai dengan kebutuhan situasi modern. Bahkan keberhasilan modernisasi pemikiran kyai tersebut perubahannya tidak klan modern dibandingkan dengan kelompok sosial politik lain yang sejak awal menyatakan diri sebagai organisasi modern.

Menurut Siddiq (1992) mencermati intensitas perjuangan kyai yang demikian, menjadi wajar kalau dalam tradisi NU (Nahdlatul Ulama), ada konstruksi sosial yang menempatkan kyai menjadi individu yang memiliki integritas moral dan selalu memiliki pengikut. Konstruksi sosial yang demikian menjadikan kyai menempati posisi elit di dalam

masyarakat NU.¹¹ Sedangkan Jerry (1991) berpendapat keberadaan kyai pada posisi bergengsi ini, dipahami dan sudah menjadi hukum sosial akan kebutuhan tokoh sentral (elit) dalam setiap masyarakat. Para ilmuwan sosial beranggapan bahwa kebutuhan masyarakat akan tokoh atau elit dirumuskan dengan teori elit yang menyatakan bahwa keberadaan (baik elit agama maupun elit politik) tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Sebagai bukti bahwa kyai sebagai tokoh penggerak pengembangan masyarakat adalah hampir semua kyai mempunyai lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal serta posisi kyai sebagai pengabdian masyarakat yang di perankan atas dasar perjuangan dan kecintaan terhadap umatnya. Gelora dunia pesantren yang cukup lama membuktikan keberadaan pesantren mempunyai kekayaan intensitas sosial yang tidak dimiliki oleh pendidikan modern sampai saat ini. Nilai-nilai kekayaan pesantren sebagai media pengabdian masyarakat telah membuktikan keberhasilan kyai dan pesantren dalam pengembangan masyarakat. Menurut Zamakksyari Dhofier (1982) kekayaan pesantren dalam pengembangan masyarakat telah diwujudkan pada konsep semangat hubungan Khaliq dan manusia (*h̄blum min allah wa h̄blum min an-nas*), integritas sosial yang berkesinambungan, kesungguhan dan semangat pengabdian, ketokohan dan keahlian, kearifan dan ketawadhuaan, ketauladanan dan kerendahan. Dari pendapat tersebut muara yang dibangun dalam pengembangan masyarakat dalam kekayaan nilai budaya pesantren adalah memadukan nilai-nilai yang ada dengan kontekstualisasi modern yang mampu memberikan jawaban permasalahan masyarakat di era globalisasi. Dalam arti tidak cukup dengan ilmu, teori, pengalaman, tetapi ketauladanan dalam setiap bentuk aktivitas sehari-hari (*'ilm bi al-'amal*).

Secara umum gagasan Islam dan pesantren dalam pengembangan masyarakat, nilai-nilai yang di bangun sejak masa Rasulullah SAW.

¹¹ Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah, (Surabaya: Balai Buku, 1992), hlm. 21.

hingga saat ini mempunyai relevansi tekstual dan kontekstual yang sama yaitu masyarakat madani menuju Ridla Allah SWT.

E. Penutup

Sudah menjadi keharusan bagi lembaga Perguruan Tinggi untuk memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian dan pengabdian. Orientasi tersebut tentu menjadi harapan apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Faktor lain, spesifikasi keilmuan sebagai basis intelektual dan keahlian khususnya studi pengembangan masyarakat mendapat tempat penting dan strategis di era globalisasi baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Bahkan dibidang agama perlu menggerakkan semangat pengabdian di masyarakat. Sehingga kebutuhan akan dalil, teori, dan pengalaman menjadi sangat penting dalam studi pengembangan masyarakat (tidak sekedar berdalil atau berteori), tetapi bukti nyata keterlibatan langsung di masyarakat. Dalam hal ini teori barat, dalil serta nilai-nilai islam dan pesantren perlu diterjemahkan dan orientasikan kembali dalam konsep yang unggul, sehingga dapat menjawab persoalan umat. Hal ini secara otomatis mendasarkan pentingnya generasi baru yang menjadi pionir-pionir di tengah-tengah masyarakat yang berbasiskan pada akademis, aktivis dan agamis. Semoga Kita Bisa.

Daftar Pustaka

- Siddiq, Achmad. 1992. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Balai Buku.
- Amrullah, Achmad. 1985. *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial-Budaya*. Jakarta: PLP2M.
- Christenson, James, dan Robinson, Jery. 1989. *Ames: Community Development in Perpective*, Iowa State University Pres.
- Jary, David. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. London: Harper Collins Publisher.
- Hayden, Robert. 1979. *Community Development Learning and Action*. Toronto Landon: University of Toronto Pres.
- Sumarjono. 1994. *Pembangaunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangaunan Masyarakat Desa.
- Suraji. 2010. *Rangkuman Studi Islam Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- _____. 2011. *Demokrasi dan Birokrasi Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Total Media.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Talizuduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mac Pherson, Stewart. 1987. *Kebijaksanaan Sosial di Dunia Ke-tiga*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Beragama di Abad Dua Satu: Sebuah Kumpulan Esai Peradaban*, Bandung: Penerbit Zikrul Hakim.
- Dhofier, Zamakksyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

